JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN DAN AUDIT
Vol. 6 No. 2, Halaman: 52 - 60
Desember 2021

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS SOSIAL PROVINSI NTT

Erwin A. D. Koroh[1]*, Wilsna Rupilu[2], dan Eugenia H. P. Tanan[3]
[1,2,3] Jurusan Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Kupang
*E-mail: ErwinKoroh@gmail.com

Abstract

This study aims to determine "How do the budget planning documents, Human Resources (HR) and the procurement of goods and services partially or simultaneously affect the absorption of the budget at the social service office of the province of NTT?" This research is causality research and the data source used is primary data. Data collection techniques were carried out by distributing questionnaires to respondents. Data analysis in this study used multiple linear regression with the help of the SPSS (Statistical Package Of Social Science) program. The results of this study indicate that there is a positive and significant influence of planning factors and human resources on the absorption of the budget at the Social Service Office of the Province of NTT, while the procurement of goods and services has a positive correlation but does not significantly affect the absorption of the budget at the Social Service Office of the Province of NTT. Thus, it can be said that planning, human resources and procurement of goods and services simultaneously affect the absorption of the budget.

Keywords: *Budget Absorption, Planning, Human Resources, Procurement Of Goods And Services*.

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk finasial. Anggaran haruslah transparan kepada publik agar dapat dikritik dan didiskusikan sehingga publik dapat memberi pendapat dan masukan. Anggaran dalam sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dalam mengawasi pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran meruapakan hasil dari perumusan dan perencanaan strategi yang dibuat, anggaran yang telah dibuat haruslah mencakup aspek-aspek anggaran sektor publik yaitu, aspek perencanaan, aspek pengendalian dan aspek akunbilitas publik.

Anggaran sektor publik menjadi sangat penting karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan apakah pemerintah dapat bertangung jawab atas dana yang diterima dari masyarakat. Dana milik masyarakat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola penerintahan berasal dari pajak, retribusi, laba perusahaan atau badan usaha milik daerah atau negara.

Pemerintah daerah setiap tahun membuat rencana keuangan tahunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana anggaran belanja terus meningkat. Perencanaan dan Penganggaran APBD tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan undang-undang tersebut Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD yang berpedoman pada Rencana Kerja SKPD. Recana kerja anggaran dan rencana kerja SKPD akan disampaikan kepada DPRD sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) untuk disahkan menjadi APBD.

APBD memuat pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan daerah, Anggaran belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Permendagri nomor 21 tahun 2011, mendefinisikan belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Oleh karena itu serapan belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Meskipun demikian bukan berarti capaian penyerapan anggaran belanja diperbolehkan lebih rendah dari yang telah direncanakan.

Penyerapan anggaran merupakan rencana sistematis yang berisikan tentang keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang berlaku dalam waktu tertentu untuk selanjutnya diwujudkan secara nyata (Mardiasmo: 2009). Secara garis besar penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu.

Sedangkan untuk penyerapan belanja yang rendah memiliki resiko lebih luas. BPKP (2011) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran yang tidak memenuhi target menyebabkan dana terlambat atau bahkan tidak tersalurkan kepada masyarakat dan tidak tersalurkan kesistem perekonomian, sehingga penerima manfaat tidak sepenuhnya bisa menikmati hasil pembangunan dan pelayanan yang dibiayai oleh anggaran publik. Senada dengan pernyataan tersebut, hasil penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga menyatakan bahwa penyerapan anggaran belanja yang rendah adalah permasalahan serius oleh karena akan memperburuk perekonomian secara umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Lambatnya penyerapan anggaran menjadi masalah klasik pemerintah daerah yang terus terjadi setiap tahunnya. Lambatnya penyerapan anggaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti Perencanaan anggaran yang tidak akurat, ketidaktepatan dan konsep perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang mengakibatkan sulitnya pelaksananaan anggaran sehingga berdampak pada program kerja yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan serta lambatnya proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran, sumber daya manusia dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparat yang mengelola keuangan juga menjadi faktor penyerapan anggaran. Permasalahan sumber daya manusia yang mengelola keuangan di antaranya adalah kurangnya jumlah pegawai, adanya rangkap tugas, hal ini karena tidak seimbangnya antara paket pekerjaan dengan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi, dan pola mutasi yang tidak merata (Oktaliza et al: 2020).

Fenomena ini juga penulis temukan terjadi pada Dinas Sosial Provinsi NTT berdasarkan pengalaman PKL dan obsevasi awal, selama periode tahun anggaran 2017-2020, di laporan realisasi anggaran Dinas Sosial NTT mencatat hampir setiap tahun anggaran ada dana yang tidak terealisasi di kas. Kegagalan target penyerapan anggaran berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan yang artinya ada dana yang menganggur, yang akan berdampak pada alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutya

Data diatas menunjukan adanya penurunan presentase realisasi anggaran belanja pada Dinas Sosial Provinsi NTT, pada tahun 2017 dan 2018 presentase realisasi anggaran dari rencana anggaran Dinas Sosial masih berada diatas 95%, namun di tahun berikutnya penurunan terus terjadi terhadap realisasi anggaran belanja dinas sosial hingga pada tahun 2020 presentase realisasi anggaran hanya mencapai 94,07%. Laporan realisasi anggaran dinas sosial menunjukan setiap tahunya ada penurunan penyerapan anggaran belanja dimana ada dana yang tidak terealisasikan di kas.

Data realisasi anggaran Dinas Sosial Provinsi juga menunjukan adanya penurunan jumlah anggaran belanja dari tahun 2017 sampai 2020 , dimana jumlah anggaran belanja pada tahun 2017 adalah Rp. 41.362.633.000,00 dan menurun hingga Rp. 39.773.329.300,00 di tahun 2020, Penurunan alokasi dana belanja pada Dinas Sosila Provinsi NTT didasari atas kinerja kementrian atau lembaga yang buruk dimana tidak dapat merealisasikan program dan kegiatan dengan maksimal pada tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penyerapan anggaran hal ini tertulis dalam Peraturan Mentri Keuangan nomor 158/PMK.02/2014 pasal 3 “kementrian negara/lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya yang selanjutnya disebut dengan sanksi.”

Tabel 1. Rencana & Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2017-2020.

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
2017	41.362.633.000	39.876.611.651	1.486.021.349	96,41
2018	38.066.830.200	36.309.594.424	1.757.235.776	95,38
2019	40.431.653.000	38.068.514.140	2.368.138.860	94,14

2020	39.773.329.300	37.414.718.314	2.358.610986	94,07

Penelitian ini ingin menguji kembali penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja yang sebelumnya telah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya (Oktaliza et al., 2020; Gagola et al., 2017; Zarinah dan Darwanis, 2016). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Dinas Sosial Provinsi NTT"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Dinas sosial Provinsi NTT yang berlokasi di Jl. Jend. Soeharto No.135, Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85142, objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi anggaran (LRA) pada Dinas Sosial Provinsi NTT tahun 2017-2020.

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2018), terdiri atas tiga teknik yaitu: a. Observasi - Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengamatit bagaimana setiap proses yang berhubungan dengan penyerapan anggaran mulai dari proses perencanaan, partisipasi sumber daya manusia atau pegawai, dan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Sosial Provinsi NTT: b. Kuisioner - Penyebaran kuesioner ini dilakukan kepada responden yaitu pegawai Dinas Sosial Provinsi NTT; c. Studi Dokumen.

Populasi dalam penelitian ini adalah 100 pegawai Dinas Sosial Provinsi NTT. Penentuan besarnya sampel dalam penelitian ini digunakan metode purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan yaitu sebagai berikut: Kasubag keuangan beserta staf, Kasubag Sub bagian kepegawaian dan umum beserta satff, Kasubag perencanaan program beserta staf, Kabid perberdayaan sosial beserta staf, Kabid penanganan fakir miskin besrta staf, Kabid rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial, dari 7 bidang dan bagian, peneliti mengambil 5 orang untuk mewakili tiap bidang dan bagian maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35 orang.

Definisi variabel untuk variabel independent menggunakan tahap Perencanaan dengan indikator kesesuaian dengan kebutuhan, Kesesuaian dengan aturan, Mudah dipahami, Kesalahan administrative, Ketepatan waktu, partisipatif: Sumber Daya Manusia dengan indikator knowledge (pengetahuan yang dimiliki pegawai), Skill (keterampilan yang dimiliki pegawai), Motivation (dorongan dan semangat untuk melakukan pekerjaan); Pengdaan Barang dan jasa menggunakan indikator Efisien, Efektif, Terbuka dan bersaing, Transparan. Variabel independent mengunakan Penyerapan Anggaran dengan Indikator Perbandingan realisasi dengan target penyerapan anggaran, Tingkat penyerapan anggaran belum mencapai 95%, Kosentrasi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS (*statistical package for social science)*

Penelitian ini akan akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja, faktor-faktor tersebut yaitu perencanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang dan sehingga secara skematis kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

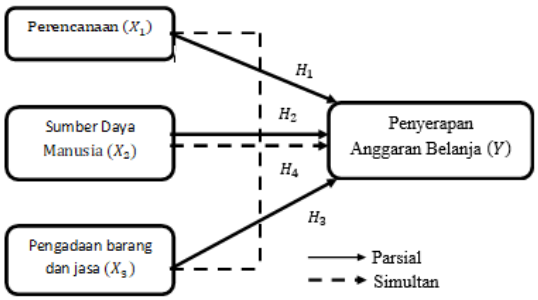

Gambar 1. Kerangka Berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tahap pengumpulan data dilakukan sejak 25 september sampai 29 septembber 2021, sempel dalam penelitian ini berjumlah 35 orang jumlah kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 35 kuisioner, dan yang diterima kembali oleh peneliti sebanyak 35 kuisioner,karakteristik responden pada tabel 1.

Tabel 2. Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Kriteria	Frekuensi (orang)	%
1.	Jenis kelamin	Laki-laki	22	62
		Perempuan	13	38
		Jumlah	35	100
2.	Lama bekerja	< 5 tahun	5	14
		5-10 tahun	13	37
		> 10 tahun	27	49
		Jumlah	35	100
3.	Pendidi	SMA	-	-

kan	Sarjana (S1)	31	88
	Magister (S2)	4	12
	Doktor (S3)	-	-
	Jumlah	35	100

Uji validitas pada penelitian ini jumlah sampel (n) = 35 dan alpha = 0,05 diperoleh r_tabel. = 0.333 Jika r_hitung lebih besar dari r_tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, dan reliabilitas jika nilai cronbach alpha di atas atau lebih besar sama dengan 0.6 (≥0.6) memenuhi syarat dan tersaji pada tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Item	r_{tabel}	r_{hitung}	Status
(Y)	Y1	0.333	0,681	Valid
	Y2	0.333	0,583	Valid
	Y3	0.333	0,561	Valid
	Y4	0.333	0,503	Valid
	Y5	0.333	0,575	Valid
	Y6	0.333	0,517	Valid
	Y7	0.333	0,379	Valid
	Y8	0.333	0,596	Valid
(X1)	X1.1	0.333	0,699	Valid
	X1.2	0.333	0,507	Valid
	X1.3	0.333	0,486	Valid
	X1.4	0.333	0,544	Valid
	X1.5	0.333	0,723	Valid
	X1.6	0.333	0,555	Valid
(X2)	X2.1	0.333	0,673	Valid
	X2.2	0.333	0,691	Valid
	X2.3	0.333	0,647	Valid
	X2.4	0.333	0,530	Valid
	X2.5	0.333	0,431	Valid
	X2.6	0.333	0,508	Valid
	X2.7	0.333	0,529	Valid
	X2.8	0.333	0,388	Valid
(X3)	X3.1	0.333	0,642	Valid
	X3.2	0.333	0,756	Valid
	X3.3	0.333	0,661	Valid
	X3.4	0.333	0,661	Valid

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Reliabilitas	Ket
(X1)	0,622	0,6	Reliabel
(X2)	0,669	0,6	Reliabel
(X3)	0,643	0,6	Reliabel
(Y)	0,665	0,6	Reliabel

Uji Hipoteis

Persamaan regresi linear berganda penelitian ialah:

$$Y = 2.700 + 0{,}690 + 0{,}389 + 0{,}101 \times e$$

Adapun penjelasan dari persamaan regresi diatas adalah:a. Nilai konstanta sebesar 2.700 menunjukkan pengaruh positif variabel independen (perencanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa). Apabila variabel independen naik atau terpengaruh dalam satu satuan maka variabel penyerapan anggaran belanja akan naik atau dipengaruhi; b. Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,690 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan perencanaan sebesar satu satuan maka penyerapan anggaran belanja akan meningkat sebesar 0,690 dengan asumsi variabel yang lain konstan; c. Nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,389 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan sumber daya manusia sebesar satu satuan maka penyerapan anggaran belanja akan meningkat sebesar 0,389 dengan asumsi variabel yang lain konstan; d. Nilai koefisien regresi X3 sebesar 0,101 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan pengadaan barang dan jasa sebesar satu satuan maka penyerapan anggaran belanja akan meningkat sebesar 0,101 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa F-hitung memiliki nilai 8,842 lebih besar dari F-tabel yaitu 3,29 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perencanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh terhadap penyarapan anggaran belanja.

Tabel 5. Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	126,424	3	42,141	8,842	,000[b]
	Residual	147,748	31	4,766		
	Total	274,171	34			

Berdasarkan tabel 6 tingkat singnifikansi variabel X1 perencanaan (0.001) kurang dari (0.05) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (3,861 ≥ 2,036) maka dapat disimpulakan bahwa secara parsial variabel perencanaan (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran belanja (Y) serta memiliki arah pengaruh positif (β = 0,690) oleh karena itu hipotesis 1 **diterima.** Hal ini berarti semakin baik perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT maka penyerapan anggaran belanja tentu akan semakin baik.

Berdasarkan tabel 6 tingkat singnifikansi variabel X2 sumber daya manusia (0.004) kurang dari (0.05) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (3,146 ≥ 2,036) maka dapat

disimpulkan bahwa secara parsial variabel perencanaan (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran belanja (Y) serta memiliki arah pengaruh positif (β = 0,389) oleh karena itu hipotesis 2 **diterima.** Hal ini berarti semakin baik sumber daya manusia yang ada pada Dinas Sosial Provinsi NTT maka meningkatkan penyerapan anggaran belanja.

Berdasarkan tabel diatas tingkat singnifikansi variabel X3 pengadaan barang dan jasa (0,571) lebih dari (0.05) dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (0,573 ≤ 2.036) maka dapat disimpulakan bahwa secara parsial variabel perencanaan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran belanja (Y) oleh karena itu hipotesis 3 **tidak diterima.** Hal ini berarti semakin baik pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT maka tidak akan meningkatkan penyerapan anggaran belanja.

Tabel 6. Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,700	6,463		,418	,679
	X1	,690	,179	,510	3,861	,001
	X2	,386	,123	,416	3,146	,004
	X3	,101	,176	,076	,573	,571

Tabel 7 menunjukan bahwa besarnya nilai R *square* berdasarkan hasil uji koefesien determinasi adalah sebesar 0,461 yang mana nilai tersebut merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari *output* tersebut diporoleh koefesien determinanasi (R^2) sebesar 0,461 yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel independen (perencanaa, sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa) terhadap variabel dependen (penyerapan anggaran belanja) adalah sebesar 46,1% sedangkan sisanya 53.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termaksud dalam penelitian ini seperti administrasi, requlasi dan uang persediaan.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,679[a]	,461	,409	2,18313

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Terhadap Penyerpan Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil pengujian variabel perencanaan anggaran (X1) terhadap variabel penyerapan anggaran belanja (Y) dengan tingkat signifikansi 0.001 serta nilai koefisien regresi 0,690 menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan. Ini berarti bahwa semakin baik perencanaan anggaran maka tingkat penyerapan anggaran belanja akan semakin meningkat pula. Dengan kata lain semakin matang pengelola anggaran dalam mengelola dan merencanakan, maka program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis pertama yang menduga adanya pengaruh signifikan perencanaan anggaran (X1) terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja (Y), sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perencanaan pada Dinas Sosial Provinsi NTT sudah cukup baik, namun masih ada juga faktor yang mengurangi kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT. Hal ini dapat dilihat pernyataan “dalam penyusunan anggaran, waktu yang tersedia sudah cukup sehingga data pendukung bisa lengkapi” yang memiliki jumlah total terkecil, artinya pelaksanaan perencanaan anggaran yang ada pada Dinas Sosial Provinsi NTT masih membutuhkan waktu yang lebih untuk melengkapi data tambahan yang dibutuhkan dalam penyusunan program serta kegiatan yang akan dilakukan, karean data tambahan akan sangat mambantu sehingga dalam proses pelaksanaan anggaran nanti kesalahan dan kekeliruan dapat diminimalisir.

Hasil di atas sejalan dengan pendekatan “normative” pada public *finance theory* (keuangan publik) yang dikemukakan oleh Rosen (2002). Pendekatan ini memfokuskan pada permasalahan kebijakan-kebijakan keuangan pemerintah *(fiscal policy*) yaitu bagaimana seharusnya pemerintah menentukan kebijakan mengenai teknik dalam kebijakan pendapatan dan melakukan berbagai kebijakan mengenai alokasi sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang tersedia demi menciptakan efisiensi alokasi, stabilisasi ekonomi, pemerataan serta kesejahteraan. *Normative public finance* juga mengisyaratkan bahwa dengan adanya keinginan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu maka terlebih dahulu pemerintah merumuskan rencana kebijakan yang kemudian diterapkan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Pendekatan normative tersebut menegaskan hasil penelitian bahwa tingkat kematangan perencanaan berbanding lurus dengan hasil yang akan diperoleh. Perencanaan memang dapat dikatakan sebagai tahapan yang paling krusial dalam konteks pengelolaan anggaran, oleh karena seluruh kegiatan yang dirumuskan dalam

perencanaan pada akhirnya akan menjadi tolok ukur besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan, sehingga keberhasilan pengelolaan anggaran dimulai dari perencanaannya. Dengan kata lain, semakin matang pengelola anggaran dalam merencanakan, maka program/kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Begitupun sebaliknya, apabila perencanaan anggaran dan program/kegiatan tidak berjalan selaras, maka akan menjadi pemicu minimnya penyerapan anggaran.Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bakara (2000) yang menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran pembangunan di Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah perencanaan anggaran. Menurutnya, perencanaan anggaran yang baik sangat mampu meminimalisir hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga tingkat pencapaian target lebih tinggi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012), juga menunjukkan bahwa faktor perencanaan berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah Jakarta.

Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) terhadap variabel penyerapan anggaran (Y) dengan tingkat signifikansi 0.004 serta nilai koefisien regresi 0.389, menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia (SDM) maka tingkat penyerapan anggaran akan semakin meningkat. Dengan kata lain, semakin kompeten pengelola anggaran, maka tujuan organisasi seperti penyerapan anggaran lebih mudah terealisasi. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis kedua yang menduga adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia (X2) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y), sehingga hipotesis kedua dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa SDM pada Dinas Sosial Provinsi NTT sudah cukup memadai namun masih ada juga faktor yang mengurangi kualitas SDM yang ada pada Dinas Sosial Provinsi NTT. Hal ini dapat dilihat pernyataan “Instansi/organisasi menyediakan fasilitas untuk pegawai yang akan mengikuti pelatihan/sertifikasi” yang memiliki jumlah total terkecil, artinya SDM yang ada pada Dinas Sosial Provinsi NTT masih membutuhkan pelatihan/sertifikasi untuk meningkatkan performa dalam bekerja terutama dalam zaman moderen saat ini dan dalam keadaan dimana protokol kesehatan diterapkan disetiap kantor.

Hasil ini sesuai dengan asas profesional yang diatur dalam *public finance theory* yang mengharuskan pengelolaan anggaran ditangani oleh tenaga yang ahli. Kemudian dari sisi tujuan utama *public finance*, yaitu menentukan alokasi sumber daya serta mengetahui pengaruhnya dari penempatan tersebut terhadap keperluan individu maupun keperluan masyarakat serta pemerintah seperti mengatur sektor-sektor penting pemerintahan, memfasilitasi kegiatan ekonomi pemerintah dan sektor swasta, menyediakan layanan dasar kepada masyarakatnya, menyediakan layanan sosial, memastikan stabilitas ekonomi dan mencapai tingkat pembangunan. Terkait dengan peran pemerintah yang besar dalam menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang optimal dan kebijakan pemerintah harus ditujukan untuk mencapai alokasi sumber ekonomi yang efisien, redistribusi pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi, maka permasalahan pemerintah menjadi demikian kompleks yang tidak hanya melihat pada sisi anggaran saja tetapi juga pengaruh langsung dan tidak langsung dari kegiatan perekonomian agregat. Oleh sebab itu pemerintah dituntut memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola aktivitas pemerintahan seperti menentukan kebijakan dan pengelolaan anggaran. Kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap perilaku diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dalam jabatannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Herriyanto (2012) menemukan bahwa minimnya kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja kementrian/lembaga di wilayah Jakarta. Hal senada ditemukan dalam Penelitian Arif (2013) bahwa minimnya kapasitas SDM merupakan faktor penyebab minimnya penyerapan APBD, Penelitian Zarinah dan Darwanis (2016) juga menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran SKPD di Kabupaten Aceh Utara.

Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran

Hipotesis ketiga yang diajukan penelitian ini ialah terkait hubungan variabel pengadaan barang dengan jasa dan penyerapan anggaran

belanja. Nilai koefisien berdasarkan hasil pengujian hipotesis yaitu koefisien sebesar +0,101 yang menunjukkan bahwa variabel pengadaan barang dan jasa berkorelasi positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Namun nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (0,573 $\leq$ 2.036) serta nilai tingkat singnifikansi variabel X3 perencanaan (0,571) lebih dari (0.05). Berdasarkan nilai tersebut maka hipotesis ketiga ditolak atau dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT maka tidak akan meningkatkan penyerapan anggaran belanja secara signifikan. Nilai koefisien berdasarkan hasil pengujian hipotesis yaitu koefisien sebesar +0,101 yang menunjukkan bahwa variabel pengadaan barang dan jasa berkorelasi positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori tersebut yaitu pengadaan barang dan jasa berhubungan secara signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran melalui barang dan jasa memiliki pengaruh yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada skala mikro maupun makro.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Fachruzzaman (2014) yang menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa tidak terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Secara deskriptif juga responden memiliki persepsi ragu-ragu bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

Pengaruh Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Semua variabel independen (perencanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa) diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (penyerapan anggaran belanja), berdasarkan hasil uji data analisis linear berganda mengguanakan SPSS diperoleh hasil uji simultan (uji F) dengan nilai Fhitung lebih besar dari pada Ftabel () dan nilai signifikan 0,00 $\leq$ 0,05, maka sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji F disimpulkan bahwa perencanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap penyerapan anggran belanja.

PENUTUP

Kesimpulan atas analisis data dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempemgaruhi pemyerapan anggaran belanja diperoleh hasil:

1. Terdapat pengaruh positif signifikan faktor perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Hal ini bermakna semakin baik perencanaan anggaran maka akan semakin baik tingkat penyerapan anggaran. Ini berarti bahwa semakin matang aparatur pemerintah sebagai pengelola anggaran dalam merencanakan, maka setiap program kerja/kegiatan tersebut dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik pula, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai.
2. Terdapat pengaruh positif signifikan kompetensi sumber daya manusia. (SDM) terhadap penyerapan anggaran. Hal ini bermakna apabila aparatur pemerintah pengelola anggaran didukung oleh kompetensi yang tinggi, maka akan memengaruhi perilaku kerja paparatur pemerintah yang kemudian akan memengaruhi kinerjanya serta kinerja organisasi secara umum. Artinya, semakin tinggi kompetensi pengelola anggaran (SDM), akan semakin meningkatkan kinerja organisasi yang dalam hal ini adalah target penyerapan anggaran.
3. Pengadaan barang dan jasa berhubungan positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja, dapat disimpulkan semakin baik pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT maka tidak akan meningkatkan penyerapan anggaran belanja secara signifikan.. Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa Faktor Pengadaan Barang dan Jasa tidak terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.
4. Perencanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap penyerapan anggran belanja.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Perencanaan, SDM serta pengadaan barang dan jasa merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran, oleh karena itu diharapkan bagi Dinas Sosial Provinsi untuk memperhatikan ketiga faktor tersebut dalam

menerapkan kebijakan-kebijakan anggarannya sehingga pelaksanaan anggaran belanja dapat lebih efektif dan efisien.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperkaya instrumen penelitian yang digunakan (selain kuesioner) sehingga dapat memperoleh penjelasan yang lebih detail terkait fenomena pada topik anggaran dan memperluas jangkauan penelitian dengan subjek instansi pemerintah lain yang merupakan pelaksana APBN.
3. Pemilihan variabel yang digunakan sebagai prediktor penyerapan anggaran perlu diseleksi lebih ketat melalui pengkajian teori dan hasil penelitian terdahulu agar faktor-faktor yang diteliti dapat memberi kontribusi lebih bermakna pada permasalahan penyerapan anggaran belanja.
4. Proses pengumpulan data diusahakan secara langsung kepada responden agar memungkinkan tingkat pengumpulan data 100%. Apabila tidak mendapat ijin untuk melakukan pengumpulan data secara langsung kepada responden, disarankan untuk menyediakan kuesioner dengan melebihi jumlah responden yang ada untuk mengantisipasi adanya kehilangan kuesioner yang dilakukan oleh petugas.
5. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja, disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menggunakan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi penyerapan anggaran belanja, terutama dalam keadaan sekarang ini dimana protokol kesehatan diterapkan di setiap kantor pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Ehmad. (2013*). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. Tesis*. Riau: Universitas Islam Riau.

Bakara F.S. (2000). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pembangunan Pemda DKI Jakarta. *Tesis*. Universitas Indonesia.

BPKP. (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta Review.

Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, *8*(1). https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330.

Herriyanto, Hendris. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementrian di Wilayah Jakarta. *Tesis.* Depok: Universitas Indonesia.

Oktaliza, Yola, Muhammad Ahyaruddin, Annie Mustika Putri. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*. 1 (2). 081-090. tps://doi.org/10.37859/mrabj.v1i2.1918.

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 *tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Putri, C. T., & Fachruzzaman, F. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Skripsi.* Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Rosen, H. S. (2002). Public Finance: Essay For The Encyclopedia Of Public Choice (No. 122). Princeton University, Department of Economics, Center for Economic Policy Studie*.*

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem *Perencanaan Pembangunan Nasional.*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara.*

Zarinah, M., & Darwanis, S. A. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualias Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah,* 5(1).